

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak

1. Konsep perlindungan hukum

Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.¹ Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif.²

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 22 januari 2020

² Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta

Dalam penegakan hukum pidana ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu:³

- 1) “Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang. Wajar pula apabila penegakan Hukum Pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 3) Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang – wenang di luar hukum.
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.”

Berdasarkan uraian di atas maka perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik dan mental, secara sosial, ekonomis dan politik, baik secara preventif maupun represif, berdasarkan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkan keadilan.

³ Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti. Hlm. 13-14

2. Bentuk – bentuk perlindungan hukum

Perlindungan hukum di Indonesia dibagi dalam beberapa macam, seperti menurut M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu: ⁴

- a. “Perlindungan hukum Preventif yaitu bentuk perlindungan hukum kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.
- b. Perlindungan hukum Represif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.”

Dari penjelasan diatas, maka perlindungan hukum sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dari kedua bentuk hukum tersebut, perbedaan dari kedua bentuk perlindungan hukum tersebut adalah, apabila perlindungan hukum preventif maka rakyat dapat mengajukan keberatan sebelum adanya keputusan. Lalu untuk perlindungan hukum represif sendiri bentuk perlindungan hukum ditujukan saat penyelesaian sengketa berlangsung.

3. Anak

- a. Pengertian anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan apabila sudah saatnya mereka akan menjadi penggerak di kehidupan mereka yang akan datang. Anak merupakan karunia yang

⁴ Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya. hlm.4-5

diberikan tuhan sehingga anak perlu dibina dengan baik agar dapat bermanfaat untuk kehidupannya kelak. Bukan hanya orang tua dan keluarga terdekat saja yang memiliki kewajiban dalam melindungi dan memberi perhatian terhadap tumbuh kembang anak, tetapi pemerintah dan masyarakat sekitar wajib melakukan pembinaan terhadap anak.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri, oleh karena itu anak memerlukan orang lain untuk membantu melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Berikut beberapa pengertian tentang anak :

1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2014

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁵

⁵ Lihat pasal 1 butir 1 undang – undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2) Konvensi Hak Anak

Definisi yang paling umum digunakan secara internasional adalah definisi anak berdasarkan konvensi hak anak. Konvensi hak ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990. Pada bagian 1 pasal 1 di dalam konvensi hak anak disebutkan anak sebagai berikut “Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”

3) KUHP Perdata

Pada KUHP Perdata pada pasal 330, tidak digunakan istilah anak melainkan istilah belum dewasa. Pada pasal tersebut disebutkan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan lebih dahulu telah kawin”⁶

⁶ Lihat pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

b. Klasifikasi anak

Menurut Undang – Undang tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, anak dikualifikasikan sebagai berikut :

1) Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁷

2) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁸

3) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

⁷ Lihat pasal 1 butir 3 Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ Lihat pasal 1 butir 4 Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri⁹

4. Perlindungan Hukum bagi anak dalam berbagai instrument internasional

Dalam substansi atau materi Konvensi Hak Anak dideskripsikan secara detil, menyeluruh (holistik), dan maju (progresif) mengenai apa saja yang merupakan hak hak anak. Konvensi Hak Anak melingkupi segenap hak yang secara tradisional melekat atau dimiliki anak sebagai manusia dan hak – hak anak sebagai anak yang memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus. Konvensi Hak anak terdiri dari 54 (lima puluh empat) pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak – hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Materi hukum mengenai hak – hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak – hak anak, yaitu :¹⁰

1. “Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak – hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak – hak untuk melestarikan dan memperthankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik – baiknya

⁹ Lihat pasal 1 butir 5 Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰ Muchamad zoni, Zulchana Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

(the rights to the highest standard of health and medical care attainable)

2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak – hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak – anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak – hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak – hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*)”
5. Bentuk Perlindungan Hukum bagi anak

Komitmen negara untuk menjamin upaya Perlindungan Anak dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28B ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengamanatkan kepada:¹¹

¹¹ Deden Ramadani, Dkk. 2019. *Terminologi Perlindungan Anak dari Situasi Eksploitasi Seksual dan Ekonomi*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. “Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;
2. Orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak; dan
3. Masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Anak, berperan aktif dalam proses Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak,”

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri, oleh karena itu anak memerlukan orang lain untuk membantu melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya. Dalam hal anak yang rentan mendapatkan kekerasan, diskriminasi dan dieksploitasi sehingga menyebabkan anak – anak tersebut tidak mendapatkan hidup selayaknya.

Anak – anak yang dieksploitasi masuk ke dalam kategori perdagangan orang. Hal ini telah diatur dalam Pasal 5 Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan:¹²

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Sesuai dengan Pasal 5 Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹² Lihat pasal 5 Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam hal anak yang dieksploitasi tentu berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Dalam Undang – Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan orang, berikut beberapa bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban : ¹³

1. “Pemberian restitusi

Berdasarkan pasal 1 ayat (13) UU TPPO menyatakan bahwa “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/ atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.” Berdasarkan pasal 48 ayat (2) UU TPPO disebutkan bahwa restitusi dapat berupa : Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:

- a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. penderitaan;
- c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

2. Rehabilitasi

Dalam pasal 1 ayat (14) UU TPPO menyatakan bahwa “Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat”. Sebagaimana tercantum pada pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa “Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak

¹³ Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

pidana perdagangan orang.” dan berdasarkan pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa “Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan”

Untuk kasus prostitusi, rehabilitasi dilakukan sebagai suatu upaya mengembalikan pelacur kepada masyarakat setelah dididik dan dilatih dengan berbagai keterampilan dan penyuluhan dalam jangka waktu enam bulan atau satu tahun, dengan tujuan memberikan kesadaran kepada mereka ke jalan yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku.¹⁴

3. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Dalam penjelasan pasal 51 ayat (1) “Reintegrasi sosial dalam ketentuan ini adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Hak atas “pemulangan” harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang, dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut.” Sebagaimana tercantum dalam pasal 54 ayat (1) UU TPPO yang menyatakan bahwa “Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka pemerintah republik indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara”

Walaupun di Indonesia anak telah diberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan haknya oleh UUD 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan perundang – undangan

¹⁴ Edi Yuhermansyah, Rita Zahara. 2017. *Kedudukan PSK sebagai Korban dalam Tindak Pidana Prostitusi*. Legitimasi, Vol. VI No. 2, Juli – Desember 2017. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Ar-Raniry. Banda Aceh

lainnya namun kenyataannya masyarakat masih ada yang memanfaatkan anak melakukan perbuatan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak dan melanggar peraturan perundang-undangan, seperti mengeksploitasi anak secara seksual.

B. Pekerja Seks Komersial

1. Pengertian Pekerja Seks Komersial

Beragam pandangan orang terhadap kehidupan pelacuran mengental dalam dimensinya masing-masing. Pelacur atau yang biasa disebut dengan pekerja seks komersial (PSK) dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah atau bayaran. Membicarakan masalah PSK juga salah satu membicarakan penyimpangan yang terjadi. PSK itu sendiri mengandung makna suatu perbuatan yang dilakukan oleh wanita dengan menawarkan serta menjual seks kepada kaum lelaki untuk melakukan hubungan seksual yang mana akan memperoleh sejumlah bayaran sebagai imbalan pemenuhan kepuasan biologis yang telah diberikan.¹⁵

Kartini Kartono mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ Siti munawaroh. 2010. Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi. Vol. 4 No. 2. Fakultas Ilmus Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta

¹⁶ Kartini kartono. 1997. *patologi sosial*. PT. raja Grafindo Persada. Jakarta.

1. “Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsunafsu seks dengan imbalan pembayaran.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.”

2. Klasifikasi PSK dalam perspektif hukum pidana

Dalam menanggapi prostitusi hukum diberbagai negara berbeda-beda, ada yang mengategorikan sebagai tindak pidana, namun adapula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia termasuk yang bersikap diam dengan pengecualian. Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut hukum pidana umum. Disamping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar diberbagai perundang undangan lainnya.¹⁷

¹⁷ Islamia Ayu A, R.B Sularto. 2011. Kebijakan Pidana dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol 1, No 1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. Pasal 296 menyatakan:¹⁸

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang. lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas riburupiah”.

Sedangkan Pasal 506 menyatakan:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satutahun”.

Dari situlah dapat diketahui bahwa hukum pidana hanya mengategorikan prostitusi sebagai suatu tindak pidana terhadap pihak perantaranya. Dalam hal ini kepolisian hanya mempunyai ruang gerak untuk melakukan tindakan hukum terhadap perantara, bilamana terdapat perantara (germo atau mucikari). Kegiatan prostitusi akan tetap berjalan selama masih banyak pelanggan.¹⁹

Ada beberapa kategori pelacuran menurut Kartini Kartono yaitu:²⁰

- a. “Pergundikan, Kategori ini yaitu pemeliharaan bini tidak resmi, atau perempuan piaraan. Mereka hidup sebagai suami istri, namun tanpa ikatan perkawinan.

¹⁸ Lihat KUHP Pasal 296 dan Pasal 506

¹⁹ Islamia Ayu A. dan R.B Sularto. *Op.cit.*

²⁰ Kartini kartono. 1997. *Patologi Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 217-220

- b. Tante Girang atau *loose married women* adalah wanita yang sudah kawin, namun tetap melakukan hubungan erotis dan seks dengan laki-laki lain baik secara iseng dengan mengisi waktu kosong. Bersenang-senang *just for fun* dan mendapatkan pengalaman-pengalaman seks lainnya, maupun secara intensional untuk mendapatkan hasil.
- c. Gadis-gadis Panggilan Gadis panggilan adalah Gadis-gadis atau wanita-wanita biasa yang menyediakan diri untuk dipanggil dan di pekerjaan sebagai prostitute.
- d. Gadis-gadis bar atau *B-girls* G adalah yang bekerja sebagai pelayan-pelayan bar sekaligus bersedia memberikan pelayanan seks kepada para pengunjung.
- e. Gadis-gadis *juvenile delinquent* adalah Gadis-gadis muda dan jahat, yang didorong ketidak matangan emosinya dan keterbelakangan inteleknya, menjadi sangat positif dan sugestibel sekali atau karakternya sangat lemah.
- f. Gadis-gadis binal atau *free girls* adalah Gadis-gadis sekolah atau putus sekolah, putus studi di akademik fakultas dengan pendirian yang “berengsek” dan menyebarkan kebebasan seks secara ekstrim, untuk mendapatkan kepuasan seksual.
- g. Gadis-gadis taxi (Di Indonesia ada juga gadis-gadis becak) Adalah wanita-wanita dan gadis-gadis panggilan yang ditawarkan dibawah ke tempat “ plesiran ” dengan taksi-taksi atau becak.
- h. Penggali emas atau *gold-diggers* adalah gadis-gadis dan wanita-wanita cantik-ratu kecantikannya, pramugari atau mannequin, penyanyi, pemain panggung, bintang film, pemain sandiwara teater atau opera, anak wayang, dan lain-lain / yang pandai merayu dan bermain cinta, untuk mengeduk kekayaan orang-orang berduit. Pada umumnya, sulit sekali mereka diajak bermain seks, yang diutamakan oleh mereka ialah dengan kelihatannya menggali emas dan kekayaan dari para kekasihnya.
- i. *Hostes* atau pramuria, Yang menyemarakkan kehidupan malam dalam *nighclub-nighclub*. Pada intinya, profesi *hostes* merupakan bentuk pelacuran halus sedangkan pada hakikatnya, *hostes* itu adalah predikat baru dari pelacuran. Sebab, dilantai-lantai dansa mereka membiarkan diri dipeluk, dicium, dan diraba-raba seluruh badannya. Juga di meja-meja minum diraba-raba dan diremas-remas oleh langganan. Para *hostes* ini harus melayani makan, minum, dansa dan memuaskan naluri-naluri seks para langganan dengan jalan menikmati tubuh para *hostes* atau pramuria tersebut. Dengan demikian, langganan biasanya

menikmati keriaan dan kesenangan suasana tempat-tempat hiburan.

- j. Promiskuitas atau *promiscuity* adalah Hubungan seks secara bebas dan awut-awutan dengan pria mana pun juga, dilakukan dengan banyak lelaki. Promiskuitas ini merupakan tindakan seksual yang sangat immoral karena sangat tidak bersusila, terang-terangan secara terbuka tampak sangat kasar, menyolok mata, dilakukan banyak laki-laki, sehingga ditolak masyarakat.”

C. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi di Indonesia

Pengaturan tindak pidana prostitusi di Indonesia baik dalam KUHP maupun dalam Undang - Undang belum ditemukan aturan yang komprehensif tentang prostitusi. Ketentuan sanksi dalam KUHP hanya mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi untuk mucikari, namun tidak ditujukan kepada pengguna jasa PSK dan PSK.

PSK dan pengguna jasa PSK dapat dipidana bilamana melakukan tindakan yang menjerumus pada asusila ataupun pornografi. Misalnya, salah satu pihak mengirimkan gambar bersifat asusila da/atau pornografi dengan menggunakan media sosial yang akan dikenakan pasal UU informasi dan Transaksi Elektronik.²¹

Aturan tentang prostitusi, baik aturan dalam KUHP maupun aturan di luar KUHP hanya mengatur tentang orang – orang yang terlibat dalam prostitusi. Sementara aturan tentang prostitusinya sendiri hingga kini

²¹ Maria Ulfah dan LBH “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan. 2019. *Pengaturan Hukum Mengenai Prostitusi di Indonesia*. <http://lbhpengayoman.unpar.ac.id/notulensi-siaran-radio-meja-hijau-01-februari-2019-pengaturan-hukum-mengenai-prostitusi-di-indonesia/> di akses pada tanggal 16 April 2020

belum ditemukan. Penelusuran terhadap aturan tentang prostitusi sejauh ini hanya menemukan beberapa aturan yang terkait prostitusi, tetapi tidak mengatur substansi prostitusinya sendiri.²² Berikut beberapa aturan terkait prostitusi di Indonesia :

1. Pengaturan dalam KUHP

Berdasarkan Pasal 296 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Pasal 506 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun” Hanya kedua pasal KUHP tersebut yang dapat menjerat kegiatan prostitusi di Indonesia. Permasalahannya Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP hanya ‘menjatuhkan hukuman kepada mucikari yang menjual seseorang yang ada di dalam kegiatan prostitusi. Tidak ada ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna atau pemakai dari jasa prostitusi baik pidana denda maupun pidana penjara.²³ Padahal seharusnya pengguna atau pemakai jasa prostitusi dikenakan pidana

²² Tongat. 2019. Tanggung Jawab Pidana Pemakai Jasa Prostitusi. Jurnal Hukum dan Pembangunan Hukum. Vol 1. No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Trisakti.

²³ Harris Y. P. Sibuea. 2015.. *Penegakan Hukum Prostitusi Di Indonesia*. Info Singkat Hukum Vol. VII, No. 10/11/P3DI/Mei 2015.
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-10-II-P3DI-Mei-2015-46.pdf
 di akses pada tanggal 24 Desember 2019

karena prostitusi itu merupakan bentuk kekerasan laki – laki terhadap perempuan, dan di Indonesia sendiri penegakan hukumnya sangat lemah sehingga banyak laki – laki “berhidung belang” ini lolos dari proses penegakan hukum itu sendiri.

Perempuan yang bekerja dalam bidang prostitusi mayoritas memiliki pendidikan yang rendah, ekonomi yang sulit dan juga kondisi sosial yang memaksa mereka harus bekerja sesuai keadaan mereka yang kurang beruntung seperti tidak memiliki pendidikan yang tinggi, harus menghidupi keluarga, jeratan hutang orang tua bahkan karena tertipu oleh oknum – oknum nakal. Perempuan yang bekerja dalam bidang prostitusi sangat susah apabila ingin keluar dari lingkungan tersebut, karena biasanya terdapat perjanjian dengan mucikarinya, dan kebanyakan perjanjian tersebut sangat merugikan perempuan – perempuan tersebut.

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia juga berpengaruh terhadap perempuan yang bekerja dalam bidang prostitusi ini karena selain kerugian materiil, apabila terjadi fenomena atau kasus mengenai prostitusi, perempuan yang bekerja dalam bidang prostitusi selalu ditampilkan secara besar – besaran dalam media – media lalu mendapat cemooh dari lingkungan sekitar, sedangkan pengguna jasa prostitusi dapat melenggang dengan gagahnya. Padahal dalam praktiknya pengguna jasa prostitusi juga berlaku aktif dalam roda kehidupan

prostusi, namun hukum seakan buta dan tidak dapat melihat keberadaannya.

2. Undang – Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan pasal 27 ayat (1) Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :
 “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau /mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”²⁴

Berdasarkan pasal 45 ayat (1) Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektornik menyatakan bahwa :
 “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”²⁵

Ketentuan Pasal 45 (1) Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang

²⁴ Lihat pasal 21 butir 1 Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁵ Lihat pasal 45 butir 1 Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektornik

Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak memuat substansi pengaturan tentang prostitusi. Dalam konteks Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan yang dilarang adalah sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dengan demikian, tidak ada muatan prostitusinya. Sangat bisa jadi ketentuan ini dikaitkan dengan modus dalam prostitusi—misalnya dengan membuat dapat diaksesnya penawaran prostitusi yang melanggar kesusilaan, tetapi secara substansial ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukanlah ketentuan yang secara khusus dimaksudkan untuk menjerat prostitusi.²⁶

3. Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan pasal 1 ayat (15a) Undang – undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa : “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”²⁷

Berdasarkan pasal 76I Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa: “Setiap Orang dilarang

²⁶ Tongat. *Op.cit*

²⁷ Lihat pasal 1 butir 15a Undang – undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”.²⁸

Walaupun di dalam undang – undang perlindungan anak jelas melarang praktik eksploitasi anak – anak untuk keuntungan, namun dalam undang – undang tersebut tidak memberikan definisi yang jelas tentang pelacuran anak.

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan bahwa :”Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: ²⁹

- a. “menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

Berdasarkan Pasal 30 Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan bahwa :”Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.³⁰

Ketentuan Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi secara eksplisit tidak mengatur tentang

²⁸ Lihat pasal 76I Undang – undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁹ Lihat Pasal 4 butir 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

³⁰ Lihat Pasal (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

prostitusi. Jika dicermati secara seksama, ketentuan tersebut hanya dapat memicu terjadinya prostitusi, bukan mengatur tentang prostitusi.³¹

5. Undang – Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial. yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.” Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa “Eksplorasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.”

Perlindungan terhadap korban sangatlah penting mengingat korban juga memiliki hak asasi yang melekat dalam dirinya. Dalam undang – undang tindak pidana perdagangan orang juga mengatur perlindungan dasar bagi korban, selain itu undang – undang ini juga memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai tindak pidana perdagangan orang berupa ganti kerugian (restitusi) bagi korban dan mengatur rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.³²

³¹ Tongat. *Op.cit.*

³² Edi Yuhermansyah, Rita Zahara. 2017. *Kedudukan PSK sebagai Korban dalam Tindak Pidana Prostitusi*. Legitimasi, Vol. VI No. 2, Juli – Desember 2017.

Persoalan penegakan hukum masalah prostitusi di Indonesia letaknya tidak pada ranah penerapan hukum, bukan pada tahap aplikasi hukum. Persoalan prostitusi di Indonesia terletak pada tahap legislasi (formulasi), yaitu belum adanya kriminalisasi terhadap prostitusi itu sendiri. Artinya, untuk mengurai benang kusut persoalan prostitusi di Indonesia harus ada politik hukum yang jelas tentang prostitusi itu sendiri. Apakah akan dijadikan sebagai perbuatan yang dilarang atau tidak. Persoalan prostitusi di Indonesia telah terlalu lama dibiarkan mengambang pada ranah perdebatan tidak berkesudahan. Koentjoro dengan mengutip Davis (1993) dan Carpenter (1994), juga menengarai hal yang sama. Perdebatan kaum feminis tentang prostitusi meruncing pada persoalan kriminalisasi dan dekriminalisasi.³³ Artinya, penegakan hukum terhadap persoalan prostitusi membutuhkan keputusan pada tahap legislasi (formulasi). Penegakan hukum—termasuk penegakan hukum dalam masalah prostitusi— hakikatnya merupakan proses melalui berbagai tahap—yaitu tahap formulasi/legislasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.³⁴ Menurut Barda Nawawi Arief, proses legislasi merupakan proses penegakan hukum *in abstracto*. Proses legislasi merupakan tahap awal yang sangat strategis dari penegakan hukum *in concreto*, sehingga kesalahan pada tahap ini merupakan kesalahan strategis yang dapat

³³ Koentjoro. 1996. *Prostitusi di Indonesia : Sebuah Analisis Kasus di Jawa*, Buletin Psikologi, Tahun IV, Nomor 2, Desember 1996.

³⁴ Barda Nawawi Arief. 2008. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

menjadi penghambat penegakan hukum *in concreto*.³⁵ Kekosongan hukum pada tahap legislasi (formulasi) dengan demikian akan berdampak langsung pada penegakan hukum *in concreto*.³⁶

D. Kebijakan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hikim pidana”. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal. Menurut Prof. Sudarto, “Politik Hukum” adalah:³⁷

- a. “Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan – badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan – peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bias digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita – citakan.”

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (*penal policy*), sasaran/adressat dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakatpada umumnya, tetapi juga mengatur pebuatan (dalam arti “kewenangan/kekuasaan”) penguasa/aparat penegak hukum. Peters pernah menyatakan, bahwa pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan Negara merupakan dimensi yuridis sesungguhnya dari hukum pidana:

³⁵ Barda Nawawi Arief. 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Gorup, Jakarta.

³⁶ Tongat. *Op.cit.*

³⁷ Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta

*tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah “mengatur masyarakat” tetapi “mengatur penguasa” (“the limitations of, and control over, the powers of the State constitute the real juridical dimension of criminal law is not policing society but policing the police”)*³⁸

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan sebagai berikut: usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang – undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosiasl (sosial policy) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “social policy” sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*).³⁹

³⁸ Barda Nawawie Arief. 1988. *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Pt. Citra Aditya Bakti. Bandung.

³⁹ Herlina. 2006. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Bayi*. Jurnal Law Reform. Volume 1, No. 2, Tahun 2006.

Prostitusi di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup rumit dan struktural. Permasalahan yang mendasar adalah masyarakat memahami masalah prostitusi sebagai masalah moral, mereka tidak menyadari persepsi dari moral mengakibatkan sikap “menyalahkan korban” dan berujung menjadikan korban semakin tertindas.

Banyaknya faktor – faktor yang mempengaruhi seseorang terjun ke dalam dunia prostitusi menyebabkan pelacuran menjadi sebuah kriminalitas yang sangat sulit ditangani karena pelacur mau tidak mau terpaksa menjalankan roda prostitusi demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain dalam dunia prostitusi memang ada mafia – mafia yang mencari perempuan dari daerah dan dibawa ke kota dengan iming – iming pekerjaan di kota, dan mafia – mafia ini biasanya bertindak licik dengan memberikan perjanjian yang sangat merugikan perempuan – perempuan tersebut.

Selama ini di Indonesia yang dapat dijerat oleh hukum hanyalah penyedia tempat atau mucikarinya saja sedangkan pengguna jasa prostitusi maupun pekerjanya tidak dapat dijerat. Hal ini terjadi karena peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu KUHP dan Undang – Undang diluar KUHP tidak mengatur hal tersebut.

Berdasarkan hal-hal diatas maka diperlukan aturan hukum yang dapat menjerat semua pihak yang terlibat dalam prostitusi. Dibutuhkan pembaharuan sistem hukum pidana untuk mengatasi permasalahan

prostitusi. Pembaharuan sistem hukum pidana dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup:⁴⁰

- a. “Pembaharuan “substansi hukum pidana”, yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiel (KUHP dan UU diluar KUHP), hukum pidana formal (KUHP) dan hukum pelaksanaan pidana;
- b. Pembaharuan “struktur hukum pidana”, yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi/lembaga, system manajemen/tata laksana dan mekanismenya serta sarana/prasaran pendukung dari sistem penegakkan hukum pidana (sistem peradilan pidana); dan
- c. Pembaharuan “budaya hukum pidana”, yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana”

Setidaknya dengan cara ini dapat mengurangi banyaknya prostitusi di Indonesia. Tujuan lainnya adalah kriminalisasi terhadap Pengguna dan PSK merupakan perwujudan atas pemenuhan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang menyatakan bahwa manusia bukanlah sebuah komoditas yang dapat diperjual belikan sehingga perlu diberikan penghargaan dan perlakuan yang sama terhadap setiap manusia. Menurut Lawrence Friedman hukum yang baik adalah yang memuat legal structure, legal substance dan legal culture. Oleh karena itu, dalam sebuah sistem hukum nasional atau negara harus disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan atau tujuan negara yang bersangkutan.⁴¹

⁴⁰ Islamia Ayu Anindia , R.B Sularto. 2019. *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

⁴¹ *Ibid.*

